

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Toleransi

1. Pengertian toleransi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi adalah sikap yang menghargai pendirian, pendapat, kepercayaan, dan kebiasaan yang berbeda atau bertentangan. Dalam pengertian yang lebih luas, toleransi dapat dipahami sebagai sifat yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan mengatur kehidupannya tanpa adanya paksaan. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap menerima perbedaan orang lain dengan lapang dada. Toleransi bukan berarti mengorbankan kepercayaan, melainkan menahan diri dan menunjukkan rasa hormat. Secara istilah, toleransi adalah sikap yang menghargai dan menghormati, serta siap menerima perbedaan pada setiap individu.²⁷

Secara etimologis, kata "toleransi" berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerare*, yang berarti bertahan atau memikul. Kata sifat dari toleransi adalah "toleran", yang menunjukkan sikap saling menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku yang berbeda atau bertentangan dengan pandangan pribadi. Oleh karena itu, toleransi mencerminkan kerelaan untuk menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang berbeda. Dalam

²⁷ M. Thoriqul Huda, Urgensi Toleransi Antar Agama Dalam Perspektif Tafsir Sya'rawi, 51.

bahasa Arab, toleransi dikenal sebagai *tasamuh*, yang berarti saling mengizinkan dan memudahkan satu sama lain.²⁸

Menurut Dewan Ensiklopedia Nasional Indonesia, toleransi beragama adalah sikap yang mau menerima keberagaman dan keanekaragaman agama serta kepercayaan yang dianut oleh kelompok atau golongan lain. Toleransi ini muncul karena adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi suatu golongan agama atau kepercayaan. Pengakuan ini tidak hanya berlaku dalam konteks kesetaraan di tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga dalam penghayatan serta praktik ibadah yang beragam, dengan tetap mengedepankan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.²⁹

Menurut Umar Hasyim, toleransi secara terminologi adalah pemberian kebebasan kepada individu atau warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan mereka, mengatur kehidupan, dan menentukan nasib masing-masing. Kebebasan ini diberikan dengan syarat bahwa tindakan dan sikap mereka tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.³⁰

Menurut M. Dahlan dan L. Lya Sofyan Ya'qub, toleransi berkaitan dengan tenggang rasa, yaitu sikap tidak menentang perilaku, kebiasaan, pandangan, atau kepercayaan orang lain yang berbeda dengan pendapat

²⁸ Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 147-148

²⁹ Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta, PT. Cipta Aditya, 1991), 384.

³⁰ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 22. 17 M. Thoriqul Huda, Urgensi Toleransi antar Agama Dalam Perspektif Tafsir Sya'rawi, 51

sendiri. Sementara itu, Y.S. Marjo mendefinisikan toleransi sebagai sifat yang menghargai paham yang berbeda dari pemahaman sendiri, dan tasamuh sebagai sikap yang tidak terburu-buru dalam menerima atau menolak pendapat orang lain. Di sisi lain, Lorens Bagus memaknai toleransi sebagai sikap seseorang atau kelompok yang menghormati keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda.³¹

Toleransi adalah aspek yang sangat penting dalam masyarakat. Ia berperan dalam menjaga kerukunan antari individu, bahkan saat menghadapi konflik yang serius. Dengan mematuhi prinsip kesetaraan dan toleransi, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang damai. Selain itu, toleransi merupakan bagian dari hak-hak sipil yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah masyarakat demokratis.³²

Toleransi berarti membiarkan orang lain memiliki pendapat yang berbeda, serta melakukan hal-hal yang tidak sependapat tanpa mengalami gangguan atau intimidasi. Dalam konteks sosial, budaya, dan agama, toleransi mencerminkan sikap dan tindakan yang menolak diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau yang tidak diterima oleh mayoritas dalam masyarakat. Dalam hal toleransi beragama, penganut mayoritas di suatu masyarakat menghormati keberadaan agama atau kepercayaan lain yang berbeda.³³

³¹ M. Thoriqul Huda, Urgensi Toleransi antar Agama Dalam Perspektif Tafsir Sya'rawi, 51.

³² Alamsyah, (In) Toleransi-Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 18.

³³ Muawanah, Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleransi Masyarakat, Jurnal Vijjacariya, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2018, 65.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang toleransi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan yang ada, serta menghindari diskriminasi terhadap kaum minoritas. Perbedaan yang dimaksud mencakup agama, ras, suku, bangsa, budaya, penampilan, kemampuan, dan lain-lain. Tujuan dari sikap toleransi ini adalah menciptakan tatanan dunia yang damai, sehingga kefanatikan dan kekejaman tidak dapat diterima

2. Faktor Yang Mempengaruhi Toleransi Beragama

Toleransi beragama dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi perilaku sosial individu. Bukhori (2012) mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi toleransi beragama sebagai berikut:

a. Kepribadian.

Kepribadian seseorang, terutama kepribadian ekstrovert yang aktif, optimis, santai, serta mampu bergaul dan menjalin hubungan dengan orang dari luar kelompoknya, berperan besar dalam proses toleransi beragama.

b. Lingkungan Pendidikan.

Lingkungan pendidikan yang mendukung dan proses pembelajaran yang efektif dapat memperbesar penerimaan terhadap kelompok yang berbeda. Melalui belajar, memahami, dan mendiskusikan perbedaan, individu dapat mengembangkan toleransi beragama.

c. Interaksi Antar Kelompok

Interaksi antara individu dengan kelompok berbeda baik dalam hal ras, budaya, suku, atau agama merupakan bagian penting dari kehidupan sosial. Kontak antar kelompok dapat mengurangi potensi intoleransi dan meningkatkan toleransi.

d. Prasangka Sosial

Prasangka sosial, yang sering kali bersifat negatif, dapat menghambat toleransi. Karena masyarakat terdiri dari berbagai perbedaan, prasangka ini perlu dikurangi untuk mencegah diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok yang berbeda. Menurut Allport (dalam Kholilur, 2016), terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi toleransi beragama:

1) Awal Kehidupan

Pengalaman awal seseorang yang dididik dengan cara positif, diterima, dicintai, dan tidak pernah disalahkan terlepas dari tindakan yang dilakukannya dapat membentuk sikap toleransi. Perlindungan dan dukungan yang konsisten selama masa awal kehidupan membantu mengembangkan sikap toleransi pada individu.

2) Pendidikan

Pendidikan yang luas memungkinkan seseorang untuk memahami masyarakat secara lebih menyeluruh. Hal ini membantu individu menyadari bahwa kebaikan suatu kelompok

tidak terpisah dari kebaikan kelompok lain, serta memperluas wawasan mereka tentang keberagaman.

3) Kemampuan Empati

Kemampuan untuk merasakan dan memahami keadaan orang lain, serta peka terhadap perasaan dan perspektif mereka, berkontribusi pada tingkat toleransi seseorang. Kepekaan sosial yang tinggi membantu individu menempatkan dirinya dalam situasi orang lain dan memahami sudut pandang mereka.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi toleransi beragama mencakup kepribadian, lingkungan pendidikan, kontak antar kelompok, prasangka sosial, awal kehidupan, pendidikan, dan kemampuan empati.

Menurut Bukhori (2012), terdapat beberapa aspek-aspek penting yang mempengaruhi proses toleransi beragama, antara lain:

a. Penerimaan

Penerimaan merujuk pada kesediaan seseorang untuk menerima perbedaan pada orang lain apa adanya, tanpa memperhatikan latar belakangnya. Jika seseorang hanya menilai orang lain berdasarkan pandangannya sendiri dan bukan sebagaimana adanya, maka kesatuan antar umat beragama dan toleransi tidak akan terwujud dengan baik.

b. Penghargaan

Penghargaan adalah sikap saling memahami dan menghormati di tengah keberagaman agama, suku, ras, dan budaya. Ini termasuk menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksakan pandangan pribadi pada orang atau kelompok lain. Penghargaan juga mencakup pemahaman bahwa iman adalah urusan pribadi dan harus dihormati.

c. Kesabaran

Kesabaran berarti mampu menahan diri dan tidak mengganggu atau menyinggung agama, keyakinan, atau ibadah orang lain. Kesabaran ini penting untuk menciptakan kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda.

d. Kebebasan

Kebebasan mencakup hak asasi manusia untuk memilih dan memeluk agama atau kepercayaan yang diinginkan tanpa adanya paksaan. Ini adalah hak setiap individu untuk menentukan keyakinan mereka secara bebas.

e. Kerjasama

Kerjasama adalah sikap atau kemauan untuk mendukung dan tidak menyinggung kelompok lain, baik yang berbeda maupun yang setara. Ini mencakup kemampuan untuk bekerja sama dan mendukung keberadaan orang atau kelompok lain secara positif.

Kelima aspek ini merupakan kunci dalam membangun dan mempertahankan toleransi beragama dalam masyarakat

Menurut Jamrah (dalam Triyani, 2016), terdapat dua aspek utama toleransi beragama:

a. Dialog Antar Umat Beragama

Aspek ini melibatkan pembicaraan yang serius dan mendalam antara umat beragama secara intensif. Dialog ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang perbedaan dan membuka diri terhadap perspektif orang lain. Melalui dialog yang konstruktif, permusuhan dapat diredam, sehingga toleransi beragama dapat terwujud.

b. Kerjasama Kemasyarakatan

Aspek ini mencakup kemampuan untuk bekerja sama antara umat beragama, yang mengarah pada terbentuknya rasa saling ketergantungan, keakraban, persaudaraan, dan saling menghormati. Kerjasama yang baik antara kelompok yang berbeda akan memunculkan sikap toleransi.

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Bukhori (2012) dalam penyusunan skala toleransi beragama, yaitu penerimaan, penghargaan, kesabaran, kebebasan, dan kerjasama. Pilihan ini diambil karena aspek-aspek tersebut

secara komprehensif menggambarkan penerimaan perbedaan, rasa hormat terhadap agama lain, kesabaran terhadap pemeluk agama lain, kebebasan dalam memilih agama, dan kemampuan untuk bekerjasama dengan kelompok yang berbeda.³⁴

3. Nilai nilai toleransi

Nilai mencerminkan pandangan seseorang tentang apa yang dianggap baik atau diinginkan. Menurut Milton Rokeach dan James Banks, nilai adalah keyakinan yang memandu tindakan seseorang, baik dalam melakukan atau menghindari perilaku yang dianggap pantas atau tidak. Nilai juga menciptakan pola dalam kehidupan, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan fokus pada nilai-nilai tertentu yang mungkin berbeda-beda. Selain itu, nilai berfungsi sebagai acuan yang berkaitan dengan aspirasi atau pilihan seseorang.³⁵

Sikap atau perilaku merujuk pada penerapan nilai-nilai multikultural secara aktif melalui komunikasi. Setiap kelompok budaya berinteraksi dengan cara yang berbeda, saling memberi masukan dan penilaian dalam penerapan nilai-nilai budaya yang beragam. Kelompok masyarakat memiliki cara berbeda dalam menyikapi multikulturalisme, seperti saling menghormati dan menghargai, serta memberikan kritik dan masukan di antara mereka.³⁶

³⁴ Bukhori. (2012). Toleransi Terhadap Umat Kristiani Ditinjau Dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri (Studi pada Jamaah Majelis Taklim di Kota Semarang).

³⁵ Dalil Adisubroto, "Nilai: Sifat dan fungsinya," n.d., hal.28.

³⁶ Halim, "Sikap Multikultural Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah," hal. 55.

Sembilan nilai yang dirumuskan oleh komunitas Gusdurian merupakan landasan perjuangan dan pemikiran Gus Dur. Komunitas ini adalah sekumpulan pengagum Gus Dur yang berkomitmen untuk melanjutkan perjuangannya. Pemikiran dan usahanya diintegrasikan ke dalam sembilan nilai, yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatria, dan kearifan lokal.

1. Ketauhidan

Ketauhidan berasal dari keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Dzat yang Maha Ada dan Maha Penuh Kasih, yang dikenal dengan berbagai nama. Ketauhidan bukan hanya sekadar diucapkan atau dihafalkan, tetapi juga harus disaksikan dan diekspresikan. Ia menanamkan kesadaran mendalam bahwa Allah adalah sumber segala sumber dan rahmat kehidupan di dunia. Pandangan ketauhidan ini menjadi dasar nilai-nilai ideal yang diperjuangkan oleh Gus Dur, melampaui institusi dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi ini diwujudkan dalam tindakan dan perjuangan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya, untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Kemanusiaan

Kemanusiaan berakar dari pandangan ketauhidan yang menganggap manusia sebagai makhluk Tuhan paling mulia, yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi.

Kemanusiaan mencerminkan sifat-sifat ketuhanan, dan kemuliaan dalam diri manusia mendorong sikap saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti juga memuliakan Penciptanya, sementara merendahkan manusia berarti merendahkan Tuhan. Dengan pemahaman ini, Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat.

3. Keadilan

Keadilan berasal dari pemahaman bahwa martabat kemanusiaan hanya dapat terwujud melalui keseimbangan, kelayakan, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak muncul dengan sendirinya dalam realitas kemanusiaan dan karenanya perlu diperjuangkan. Melindungi dan membela kelompok yang mengalami ketidakadilan adalah tanggung jawab moral yang melekat pada kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur mengambil tanggung jawab ini dengan tekun, berusaha menciptakan keadilan di tengah masyarakat.

4. Kesetaraan

Kesetaraan berakar dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang setara di hadapan Tuhan. Ini menuntut perlakuan adil, hubungan yang sederajat, serta ketiadaan diskriminasi dan subordinasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini terlihat jelas dalam kehidupan Gus Dur, terutama saat ia membela

dan memihak pada kaum tertindas, termasuk kelompok minoritas dan mereka yang terpinggirkan.

5. Pembebasan

Pembebasan berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia bertanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, serta membebaskan diri dari berbagai belenggu. Semangat pembebasan hanya dapat dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari ketakutan, dan otentik. Dengan nilai ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi lahirnya individu-individu merdeka yang mampu membebaskan diri dan orang lain

6. Kesederhanaan

Kesederhanaan berakar dari pemikiran yang mendalam, serta sikap dan perilaku yang wajar dan patut. Ia menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dipraktikkan, sehingga menjadi bagian dari jati diri. Kesederhanaan juga berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap berlebihan, materialistis, dan koruptif. Kesederhanaan yang ditunjukkan Gus Dur dalam berbagai aspek kehidupannya menjadi teladan dan pelajaran bagi banyak orang.

7. Persaudaraan

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam menghadapi perbedaan tersebut, rasa persaudaraan yang terikat oleh nilai kemanusiaan dan semboyan "bhineka tunggal ika" dapat menjadi

landasan untuk saling memahami dan mempercayai. Menurut Gus Dur, persaudaraan adalah sikap yang meninggikan harkat dan martabat manusia. Ia menegaskan bahwa persaudaraan harus dijunjung tinggi, bahkan terhadap mereka yang memiliki keyakinan dan pemikiran berbeda.

Rasa persaudaraan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI; dengan menempatkan persaudaraan di atas segalanya, kita dapat menghilangkan sekat-sekat antar umat beragama. Jika rasa persaudaraan sudah tertanam dalam diri setiap individu, maka dialog antar agama seharusnya tidak lagi berfokus pada perbedaan teologis atau kepentingan pribadi, melainkan pada penyelesaian masalah bersama, yaitu masalah kemanusiaan.

8. Kekesatriaian

Kekesatriaian berakar dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini demi mencapai tujuan yang diinginkan. Proses perjuangan ini mencerminkan integritas pribadi, termasuk rasa tanggung jawab terhadap langkah yang diambil dan konsekuensi yang dihadapi, serta komitmen dan istiqomah yang tinggi. Kekesatriaian Gus Dur menonjolkan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani setiap proses, tak peduli seberat apa pun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapai.

9. Kearifan Lokal

Kearifan lokal mencakup nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat. Gus Dur menjadikan kearifan lokal sebagai sumber gagasannya untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan, tanpa menghilangkan identitas yang melekat pada masyarakat. Ia berpendapat bahwa kearifan lokal seharusnya menjadi kekuatan dalam menegakkan keadilan sosial yang sejalan dengan budaya Indonesia.

Kearifan lokal berfungsi untuk memfasilitasi pemahaman tradisi dan nilai-nilai, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun rasa kebersamaan dan solidaritas. Selain itu, kearifan lokal membantu dalam mengembangkan nilai-nilai sosial masyarakat, menciptakan relasi yang dinamis, moral, dan etika. Sebagai identitas bangsa, kearifan lokal diciptakan oleh kebijaksanaan, dijaga dengan keikhlasan, dan dirawat melalui kesadaran. Dengan demikian, menjaga kearifan lokal adalah bagian dari tugas kemanusiaan yang harus dilakukan setiap individu.

B. Komunikasi Politik

1. Pengertian komunikasi

Komunikasi politik memegang peran yang sangat penting dalam sistem politik dan berfungsi sebagai "urat nadi" dalam setiap proses politik. Semua elemen dalam struktur politik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, media, dan warga negara terlibat dalam proses pertukaran

makna melalui komunikasi politik. Aktivitas komunikasi politik mencakup berbagai aspek seperti pengumpulan kepentingan, penyampaian dan penerimaan aspirasi, negosiasi, sosialisasi, kampanye, dan lobi.

Bergantung pada titik pandangnya, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta. Singkatnya, suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang lain; atau pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan symbol. Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan oleh individu untuk membangun makna yang mencerminkan citra mereka tentang dunia. Berdasarkan citra tersebut, mereka bertindak dan bertukar citra melalui simbol-simbol.³⁷

Akhirnya, penting untuk memperhatikan arti utama dari proses yang mendasari definisi komunikasi. Proses ini melibatkan arus, perubahan, dan ketidaktetapan dalam interaksi antara individu. Barlund menggambarkan sifat proses komunikasi sebagai sesuatu yang berkembang, dinamis, berkelanjutan, sirkular, tidak dapat diulang, tidak

³⁷ Sarihati, Tati, et al. *Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022.

dapat dibalikkan, dan kompleks. Sebagai proses, komunikasi tidak memiliki titik awal yang jelas dan berlangsung tanpa henti, mencakup interpretasi pribadi, serta pertukaran sosial dan politik. Proses ini juga tidak memiliki penyebab yang mudah terlihat untuk akibat yang dapat diamati.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, komunikasi dapat disimpulkan sebagai proses interaksi sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membangun makna. Makna yang dibentuk mencerminkan citra mereka mengenai dunia dan untuk bertukar citra tersebut, terutama melalui simbol-simbol. Proses komunikasi bersifat dinamis, berkembang, dan kompleks, serta mencakup interpretasi pribadi dan pertukaran sosial yang terus-menerus berlangsung.

2. Pengertian politik

Politik dapat dipahami sebagai proses penentuan siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan dengan cara apa pembagian nilai-nilai oleh pihak yang berwenang serta melibatkan kekuasaan dan para pemegangnya. Ini juga mencakup pengaruh dan tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh tersebut. Meskipun terdapat berbagai pandangan, umumnya ada kesepakatan bahwa politik berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia.³⁸

Secara umum, politik dapat dipahami sebagai berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang berkaitan dengan proses

³⁸ Safitri, Kartika. "Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Tahun 2006."

penetapan tujuan. Pengambilan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan sistem politik melibatkan pemilihan dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas terhadap tujuan yang dipilih.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diperlukan kekuasaan dan kewenangan yang akan digunakan untuk membina kerja sama serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses itu. Metode yang digunakan dapat bersifat persuasif (meyakinkan) dan, jika diperlukan, juga dapat bersifat paksaan. Tanpa adanya elemen paksaan, kebijakan ini hanya akan menjadi ungkapan keinginan semata.³⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa politik mencakup berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang berhubungan dengan penetapan tujuan dari sistem tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan ini, diperlukan kekuasaan dan kewenangan yang digunakan untuk membina kerja sama serta menyelesaikan konflik yang muncul selama proses tersebut.

3. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi tentang politik antara pemerintah dan masyarakat, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.⁴⁰

Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan disampaikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya,

³⁹ Djuyandi, Yusa. "Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto Dalam Pemilihan Ketua Dpd Ii Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016–2021." *Jurnal Wacana Politik* 2.1 (2017): 10-21.

⁴⁰ Surbakti, Ramlan. *Memahami ilmu politik*. 2010 Hal 152

serta antara sistem sosial dan sistem politik. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan pertukaran informasi antara individu dan kelompok di berbagai tingkatan masyarakat. Komunikasi politik tidak hanya mencakup penyampaian pandangan dan harapan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan, latar belakang, dan rekomendasi dari pejabat berkuasa kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi politik juga mencakup reaksi masyarakat terhadap pandangan, janji, dan saran dari penguasa. Oleh karena itu, komunikasi politik sangat penting dalam sistem politik, berperan sebagai elemen dinamis yang menjadi bagian integral dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik.⁴¹

Menurut Nimmo Komunikasi politik berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam situasi konflik serta dampaknya. Kegiatan komunikasi politik melibatkan berbagai elemen, termasuk komunikator politik seperti aktivis, konsultan, politisi, ahli pemasaran, profesional, dan juru bicara. Selain itu, komunikasi politik mencakup aspek-aspek seperti persuasi, pesan politik, media politik, audiens, dan efek yang timbul dari proses komunikasi politik itu sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah proses pengiriman informasi politik yang penting dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya, serta antara sistem sosial dan

⁴¹ Patta, Abdul Kadir, et al. "Political Inclusiveness Degree of State Civil Apparatus and Bureaucracy on Mayor and Deputy Mayor Elections in Palu City 2015." *Devotion: Journal of Research and Community Service* 4.6 (2023): 1297-1316.

sistem politik. Dalam konteks ini, komunikasi politik merupakan proses yang terus-menerus dan melibatkan pertukaran informasi antara individu dan kelompok di semua tingkat masyarakat.

Menurut Dan Nimo dalam ada beberapa prinsip komunikasi politik:

1. Orang yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal, dapat berkomunikasi secara efektif dibandingkan kondisi berbeda.
2. Komunikasi lebih efektif, jika terjadi homofili antara komunikator dan komunikan.
3. Homofili dan komunikasi saling memelihara karena semakin banyak komunikasi antar mereka.

Teori Homofili berpendapat bahwa penyampaian informasi kepada kelompok yang memiliki kesamaan seperti usia, ras, agama, ideologi, atau pandangan politik akan lebih efektif karena adanya dasar kesamaan yang memudahkan pemahaman dan penerimaan informasi.⁴²

4. Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai langkah atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menyampaikan pesan-pesan politik yang bertujuan mengubah sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media.⁴³

Dijelaskan bahwa strategi komunikasi politik mencakup seluruh keputusan yang diambil terkait tindakan yang akan dilakukan saat ini

⁴² Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik : Konsep, teori, dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴³ Amelianti, F. (2021). *Komunikasi politik pada pemilihan kepala desa di desa segati* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

untuk mencapai tujuan politik di masa depan. Konsep ini berfokus pada bagaimana merencanakan politik yang efektif untuk menarik minat masyarakat yang akan menjadi calon pendukung.

Tahapan strategi komunikasi politik yang perlu dilaksanakan oleh komunikator politik meliputi merawat ketokoh, menciptakan kebersamaan, serta membangun konsensus.

a. Merawat Ketokohan

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik adalah merawat citra tokoh dan memperkuat kelembagaan. Ketokohan komunikator politik dan kestabilan lembaga politik memiliki dampak signifikan terhadap komunikasi politik yang dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketika membahas ketokohan, secara otomatis kita juga membahas kredibilitas, yang merupakan persepsi publik mengenai kemampuan tokoh atau komunikator politik. Menurut Berlo, kredibilitas akan muncul jika seorang komunikator memiliki:

- 1) Keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.
- 2) Pengetahuan, yaitu pemahaman yang mendalam tentang substansi yang akan disampaikan
- 3) Sikap, yaitu menunjukkan kejujuran dan keramahan; dan terakhir,

- 4) Sistem sosial dan budaya, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa ketokohan politik dapat menghasilkan kepercayaan masyarakat, yang berasal dari kredibilitas yang terbentuk dalam masyarakat.

b. Menciptakan Kebersamaan

Langkah selanjutnya adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dan khalayak dengan cara mengenal audiens dan menyusun pesan yang bersifat homofilis. Suasana homofilis yang perlu dibangun mencakup persamaan bahasa, usia, ras, agama, dan ideologi (simbol komunikasi) serta kesamaan kepentingan dengan khalayak, terutama terkait pesan politik, metode, dan media yang digunakan.

Dalam diri masyarakat yang berkaitan dengan politik meliputi kepentingan, keyakinan, dan motivasi khalayak, baik yang bersifat politik maupun non-politik. Sejalan dengan hal ini, Lasswell mengemukakan bahwa terdapat tiga bentuk pengaruh dalam suatu kelompok, yaitu:

1. Area perhatian, yaitu bidang di mana perhatian individu sejalan dengan perhatian masyarakat.

2. Area publik, yaitu bidang yang mempengaruhi seseorang karena adanya keterikatan psikologis yang kuat antara individu dan kelompok.
3. Area sentimen, yaitu sesuatu yang ada dalam diri seseorang, di mana terdapat ikatan yang sulit dijelaskan dan hanya dapat dirasakan kebenarannya.

c. Membangun Konsensus

Makna konsensus berkaitan erat dengan keteraturan, kebersamaan, dan ketertiban dalam kehidupan sosial, dengan memandang perilaku manusia sebagai komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Untuk menjaga ketentraman dan keteraturan, diperlukan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan pencarian solusi yang menyangkut kepentingan bersama. Pendekatan ini, yang akan dijelaskan lebih lanjut, dikenal sebagai teori konsensus. Proses kunci dalam teori ini adalah sosialisasi, yang merujuk pada cara manusia mempelajari perilaku tertentu agar dapat saling memahami perbedaan yang ada.

Konsensus adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan yang disetujui secara bersama oleh kelompok atau individu setelah melalui perdebatan dan penelitian dalam konteks intelijen kolektif. Konsensus ini bersifat abstrak dan tidak langsung berdampak pada konsensus politik praktis. Namun, pelaksanaan agenda yang

dihasilkan dari konsensus tersebut akan lebih mudah memengaruhi keputusan politik.⁴⁴

Konsensus dapat dimulai dari sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh suatu kelompok dan diperluas ke kelompok yang lebih besar, seringkali berdasarkan kepentingan dan melalui fasilitasi. Proses ini bertujuan untuk mencapai konvergensi dalam pengambilan keputusan yang akan dikembangkan lebih lanjut.⁴⁵ Teori konsensus harus mengkaji integrasi nilai di tengah masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa aturan budaya suatu masyarakat atau struktur sosialnya menentukan perilaku anggotanya, mengarahkan tindakan mereka dengan cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat lain. Hal ini mirip dengan tata tertib yang diterapkan di berbagai bidang, seperti batasan-batasan yang ada di sekolah yang tidak boleh dilanggar. Demikian pula, individu akan berperilaku serupa dalam konteks sosial karena mereka terikat oleh aturan-aturan dari budaya yang sama.

Meskipun tidak terlihat dalam struktur fisiknya, orang yang disosialisasikan dalam aturan ini menemukan kepastian dan hal-hal yang menentukan. Menurut teori sosiologi, sosialisasi membentuk norma dan nilai yang menghasilkan kesepakatan atau konsensus, terutama terkait perilaku dan keyakinan individu yang sesuai. Tanpa

⁴⁴ George Ritzer and Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

⁴⁵ Saifuddin, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta, 2006).

kedua hal ini, masyarakat tidak dapat berfungsi. Oleh karena itu, perspektif ini disebut teori konsensus. Melalui sosialisasi, aturan-aturan budaya mengatur perilaku, memastikan konsensus dalam perilaku yang diharapkan, dan dengan demikian menjaga keteraturan sosial

Emil Durkheim menyimpulkan bahwa eksistensi masyarakat bergantung pada konsensus moral. Ide bahwa konsensus moral adalah syarat penting untuk menciptakan keteraturan sosial merupakan salah satu dasar dari teori sosial fungsional. Konsensus ini tercermin dalam konsepnya yang terkenal, yaitu kesadaran kolektif, yang menjadi sumber solidaritas dan mendorong individu untuk bekerja sama. Solidaritas mekanik dari kesadaran kolektif ditentukan oleh pernyataan Durkheim bahwa setiap orang "mengetahui bahwa kita sama dengan orang-orang yang merepresentasikan kita."⁴⁶ Representasi yang dimaksud oleh Durkheim tidak hanya mencakup kesamaan fisik, tetapi juga kesamaan pikiran dan perasaan.⁴⁷

Konsensus Nasional salah satunya Pancasila yang dihasilkan dari kesepakatan seluruh Bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Selain sebagai pemikiran filsafat dan dasar negara, Pancasila juga berkembang menjadi ideologi yang memengaruhi

⁴⁶ Ritzer and Goodman, *Teori Sosiologi Modern*.

⁴⁷ Sri Susanti, *Sosiologi 2* (Jakarta: Quadra, 2008).

kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ideologi ini menjadi ideologi negara dan bangsa Indonesia, yang berarti merupakan ideologi nasional.

Ideologi nasional terdiri dari keseluruhan ide atau gagasan yang berakar pada prinsip-prinsip pemikiran Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945. Ini berfungsi sebagai pedoman konstitusional untuk mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti ideologi lainnya, Pancasila memerlukan penyempurnaan, karena tidak ada ideologi yang sempurna dan abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi perlu mengalami proses dialektika agar dapat berkembang dan tetap relevan dengan perubahan.

Dalam konteks ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai tanah air berhak terlibat dalam merevitalisasi Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita patut bersyukur bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, sehingga diharapkan dapat terus berkomunikasi dengan dinamika masyarakat.⁴⁸

C. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

⁴⁸ Suko Wiyono, "EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA," *LIK HITAPRAJNA*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 15, no. 1 (2012): 37–40.

Kepala Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat-istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah Kabupaten

Menurut Suriakusumah dan Prayoga Bestari, Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memimpin pemerintah desa dalam menjalankan berbagai urusan domestik, tugas pemerintah umum, pengembangan masyarakat, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.

2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa secara langsung diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dilaksanakan secara demokratis dengan mengikuti prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

a. Tahapan Pencalonan

1) Pengumuman dan Pendaftaran:

- a) Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemilihan dan membuka pendaftaran calon kepala desa.
- b) Pendaftaran dilakukan sesuai dengan daftar pemilih yang ada, dengan persyaratan calon yang harus dipenuhi seperti

WNI, bertakwa kepada Tuhan, berpendidikan minimal SMP, dan lain-lain.

b. Penjaringan dan Penyaringan:

- 1) Menyaring dan memverifikasi bakal calon sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- 2) Mengumumkan calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada masyarakat.

3. Penyusunan Jadwal dan Rencana Biaya.

- a. Menyusun jadwal pemilihan, rencana biaya, dan tempat pemungutan suara.
- b. Mempersiapkan administrasi pemilihan.

4. Tahapan Pemilihan

- a. Kampanye dilakukan dalam waktu tertentu sebelum pemungutan suara, dengan pengaturan waktu dan tempat yang diatur oleh panitia.
- b. Pemungutan Suara
 - 1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil (LUBER).
 - 2) Pengundian tanda gambar calon kepala desa dilakukan di hadapan pejabat dan masyarakat.
- c. Perhitungan Suara

- 1) Perhitungan suara dilakukan segera setelah pemungutan suara dengan melibatkan calon, saksi, dan pejabat.
 - 2) Surat suara yang tidak memenuhi ketentuan dianggap tidak sah.
- d. Penetapan Kepala Desa Terpilih
- 1) Calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai kepala desa terpilih.
 - 2) Pengumuman dan pelantikan kepala desa terpilih dilakukan oleh Bupati/Walikota setelah melalui proses pengesahan.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan keberhasilan dalam pemilihan. Kepala Desa terpilih diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diatur dalam UU Desa.⁴⁹

⁴⁹ Ma'rifah, Ulfah. *Implementas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 112 Tahun 2024 Tentang pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Serang Tahun 2015*.Diss. IPDN, 2018.